

KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rinda Fitriani Khoza¹, Ainur Ropik², Erik Darmawan³

¹²³Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail : rindafitriani.k@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses women's representation in the regional leadership council of the Indonesian Democratic Party of Struggle for South Sumatra Province, which will focus on women's management in the regional leadership council of the Indonesian Democratic Party of Struggle for South Sumatra Province. Therefore, this study aims to find out how the role and process in women's representation in the management of the regional leadership council of the Indonesian democratic party of struggle for South Sumatra province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques are carried out by interview and documentation methods. The primary data sources are six cadres of South Sumatra DPD PDIP . Secondary data sources are books, journals and related documents. In analyzing this research using the theory of the function of political parties. The results of this study show that the role of women administrators in South Sumatra DPD PDIP is carried out well and has the support of South Sumatra DPD PDIP and in the process of recruitment of administrators carried out with the stages of filling out the form, submitting the vision and mission, selection, determining women administrators, ratifying party management. The 30% female representation in the South Sumatra PDIP DPD has fulfilled the 30% requirement in not only the legislature but also in the management of women and female cadres of the South Sumatra PDIP DPD.

Keywords: Representation, Women, Management, DPD PDIP

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keterwakilan perempuan pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi indonesia perjuang provinsi Sumatera Selatan yang mana akan fokus pada kepengurusan perempuan pada dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan proses dalam keterwakilan perempuan pada kepengurusan dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer ialah enam orang kader DPD PDIP Sumatera Selatan. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen terkait. Dalam menganalisa penelitian ini menggunakan teori fungsi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengurus perempuan di DPD PDIP Sumatera Selatan dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari DPD PDIP Sumatera Selatan dan dalam proses rekrutmen pengurus dilakukan dengan tahap-tahapan pengisian blangko, pengajuan visi misi, seleksi, penetapan pengurus perempuan, pengesahan kepengurusan partai. Keterwakilan perempuan 30% pada DPD PDIP Sumatera Selatan telah memenuhi ketentuan 30% pada tidak hanya legislatif akan tetapi pada kepengurusan perempuan dan kader perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Keywords: Keterwakilan, Perempuan, Kepengurusan, DPD PDIP

PENDAHULUAN

Suatu negara yang demokratis pada umumnya didapatkan banyak partai atau multipartai bahkan terdiri dari partai politik. Dengan demikian suatu negara demokrasi akan memberikan suatu hak kebebasan untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam partai politik untuk ikut serta dan bergerak

guna perubahan negara kearah yang lebih baik yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita nasional. Peranan dari partai politik sangat penting karena dalam sebuah negara yang demokratis partai politik hadir sebagai kelompok kepentingan yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang pasti yang akan menjadi sebuah jalan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.

Keterwakilan perempuan sangat diperlukan dalam instansi publik yang menyangkut pembentukan kebijakan politik terutama kebijakan mengenai perempuan dan anak-anak, perempuan diperlukan suara dan pendapatnya dalam dunia politik pada tahap memformulasikan kebijakan yang terkait dengan anak-anak dan perempuan untuk mengatasi bentuk kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan korbannya adalah perempuan, serta kejahatan terhadap anak-anak dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya keterwakilan perempuan untuk ambil adil dalam pembuatan kebijakan agar tercapai keputusan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena itu keterwakilan perempuan sangat diperlukan di dalam dunia politik dan didalam partai politik.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebenarnya sangat menarik untuk diteliti karena PDIP dikenal aktif sebagai partai politik yang tidak pernah absen dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden, kepala daerah maupun di lembaga legislatif, dalam hal perwakilan perempuan disaat partai lain masih ada yang belum bisa memenuhi kuota 30% PDIP sudah terlebih dahulu berhasil dalam pemenuhan kuota perempuan 30% apalagi di DPD PDIP Sumatera Selatan, selain pemenuhan kuota sudah terpenuhi baik di legislatif maupun dalam kepengurusan.

Permasalahan di atas dengan adanya sebuah proses yang harus dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan dalam upayanya untuk dapat pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dan peran apa saja yang dilakukan oleh kader perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan. Sehingga keterwakilan perempuan 30% dapat terpenuhi ditengah permasalahan masih banyaknya partai politik yang belum bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian yang akan peneliti teliti karena berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti uraikan bahwa DPD PDIP Sumatera Selatan adalah partai yang telah memenuhi keterwakilan perempuan dalam

kader maupun kepengurusan yang akan peneliti teliti lebih dalam mengenai proses yang dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan serta peran yang dijalankan oleh kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori fungsi partai politik oleh Miriam Budiardjo untuk menganalisis lebih dalam mengenai keterwakilan perempuan pada kepengurusan di DPD PDIP Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengindikasikan bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berbasis hasil wawancara terstruktur yang diajukan melalui wawancara terbuka secara langsung dan mendalam dengan daftar pertanyaan antara peneliti dan para narasumber serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara, data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat secara tepat menjawab proses dan peran kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan. Lokasi tempat penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan dengan melibatkan enam orang narasumber yaitu pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan. Teori yang peneliti gunakan adalah teori fungsi partai politik oleh Miriam Budiardjo. Teori ini menjelaskan mengenai fungsi partai politik di negara-negara demokrasi yang ada, teori ini umumnya digunakan dalam penelitian-penelitian mengenai partai politik. Teknik analisis data hasil wawancara menggunakan "*Analysing Interviews*" oleh Kathryn Roulston dalam *Qualitative Data Analysis* yang akan membantu peneliti dalam menganalisa data hasil wawancara .

Ada tiga tahapan dalam "*Analysing Interviews*" ,pertama, (*Reducing Data to Locate and Examine Phenomena of Interest*) menghilangkan pernyataan berulang dan data yang tidak relevan dengan fenomena yang sedang diteliti jadi pernyataan berulang dari hasil wawancara akan dihilangkan, kedua (*Reorganizing, Classifying, and Categorizing Data*) peneliti menghasilkan analisis pernyataan tentang topik dengan menyusun kembali dan mengatur ulang data, kode, kategori, atau cerita, ketiga (*Interpreting and Writing up Findings*) pada fase ini, peneliti mempertimbangkan pernyataan dan proposisi berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori untuk mengembangkan argument.

HASIL DAN DISKUSI

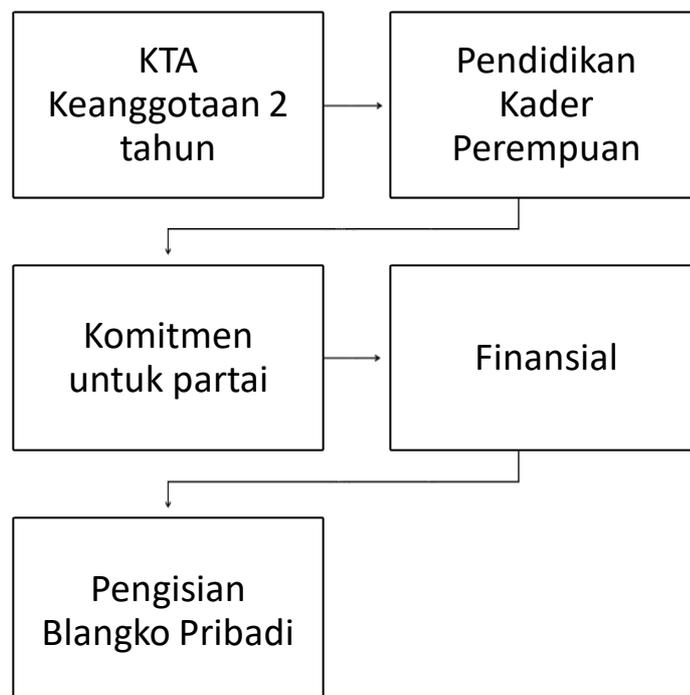
Setelah peneliti melakukan wawancara dengan enam orang kader dan pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan dan mengumpulkan dokumen terkait dengan keterwakilan perempuan pada

kepengurusan di DPD PDIP Sumatera Selatan, maka peneliti telah memperoleh data yang diperlukan untuk dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dengan data yang sudah peneliti peroleh dari lapangan tersebut pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dan analisis data, peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan teori fungsi partai politik.

Dalam proses pemenuhan kepengurusan perempuan yang dilakukan oleh DPD PDIP Sumatera Selatan dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan ditentukan dengan memiliki KTA (kartu tanda anggota) anggota DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu minimal 2 tahun, telah mengikuti pendidikan kader perempuan, memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan partai PDIP, finansial yang baik dan mengisi blanko pribadi oleh calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti KTA minimal 2 tahun, pendidikan kader perempuan, finansial, serta pengisian blanko. Hal ini juga yang menjadi salah satu penentu dalam tahap seleksi kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Bagan.1 Proses Seleksi Calon Pengurus Perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan



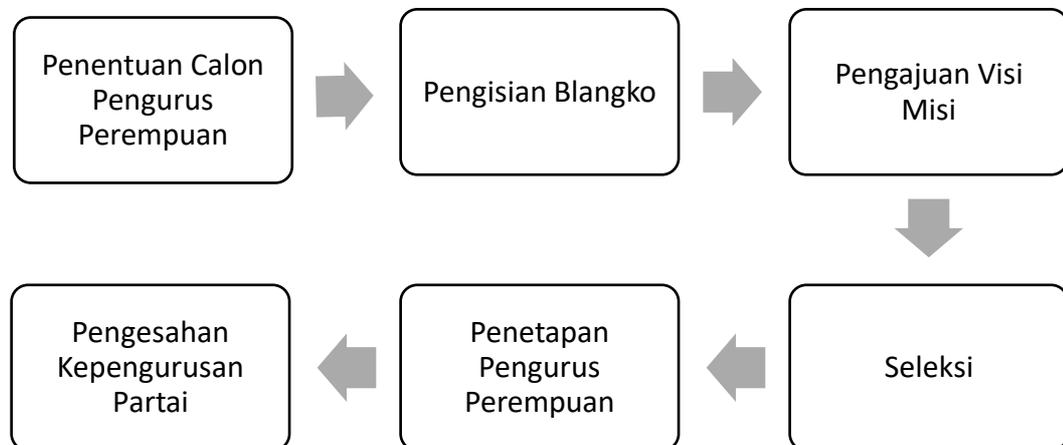
Sumber: *Data diolah Oleh Peneliti*

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yopi Nugraha selaku Sekretariat Sayap Partai DPD PDIP Sumatera Selatan.

“Dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu kader perempuan tersebut harus sudah ber KTA keanggotaan minimal 2 tahun, melaksanakan pendidikan kader perempuan partai PDIP, selain itu kader tersebut memiliki keadaan finansial yang cukup untuk dapat membangun partai kemudian dalam tahap seleksi para kader perempuan harus mengisi blangko pribadi yang didalamnya berisi pertanyaan seputar partai PDIP.”

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa dalam menentukan calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan memperhatikan beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti KTA minimal 2 tahun, pendidikan kader perempuan, finansial, serta pengisian blanko. Hal ini juga yang menjadi salah satu penentu dalam tahap seleksi kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Bagan.2 Proses Seleksi Kepengurusan Perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan



Sumber: *Data diolah oleh peneliti*

Setelah penetapan pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan kepengurusan partai yang mengacu pada aturan AD/ART pasal 86 tentang pengesahan kepengurusan partai.

Pengurus didalam DPD PDIP Sumatera Selatan secara keseluruhan memiliki kepengurusan sebanyak 23 pengurus diantaranya adalah 16 pengurus laki-laki dan 6 pengurus perempuan dalam berbagai bidang seperti bidang internal, bidang pemerintahan, bidang kerakyatan, sekretaris dan bendahara. Keterwakilan perempuan telah mencapai 30% pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan seperti pada tabel dibawah ini yang sudah peneliti tampilkan.

Tabel.1 Komposisi Pengurus DPD PDIP Sumatera Selatan

Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
Jumlah	16	7	23
Persentase	70%	30%	100%

Sumber: Surat Keputusan dewan pimpinan pusat partai demokrasi Indonesia perjuangan tentang struktur dan komposisi dewan pimpinan daerah partai demokrasi Indonesia perjuangan Sumatera Selatan masa bakti 2019-2024”.

Penegasan akan pentingnya peran dari pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan juga dapat dilihat dari adanya suatu bidang kerakyatan yang didalam komposisinya terdapat pengurus perempuan sebagai wakil ketua bidang kesehatan ,perempuan dan anak,yang sudah ada di dalam surat keputusan mengenai struktur dan komposisi DPD PDIP Sumatera Selatan. “Perempuan memiliki peranan khusus dalam dunia politik, ini tercermin di dalam kepengurusan partai PDI Perjuangan dimana salah satu wakil ketua bidang ada yg secara khusus menangani urusan perempuan dan anak..”

Suatu permasalahan yang masih belum terselesaikan di Indonesia adalah masalah *stunting* pada anak-anak Indonesia yang disebabkan oleh gizi buruk yang berkepanjangan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak sehingga memerlukan suatu tindakan, maka peranan yang dilakukan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan adalah bergerak dalam permasalahan *stunting* pada anak-anak. dan program mengatasi *stunting* ini telah dilaksanakan sampai ke kabupaten maupun kota, akan tetapi yang menjadi fokus masalah *stunting* adalah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ade Kurniawan selaku kader DPD PDIP Sumatera Selatan. “Sosialisasi *Stunting* dilakukan didaerah karena tingginya *stunting* banyak terjadi didaerah yang pada pelaksanaannya dilakukan di daerah OKU sampai OKU Selatan dan sekitarnya biasanya dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun”

Adapun kegiatan yang pengurus perempuan laksanakan seperti, kegiatan bakti sosial, kegiatan membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka HUT RI yang ke-77, Pelaksanaa

penanaman pohon serentak dalam rangka memperingati hari lahir Megawati Soekarno Putri, pelaksanaan sunat massal dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di klinik PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Ogan Komering Ulu, hanya membagikan 500 perlengkapan alat tulis sekolah kepada anak-anak tapi juga membagikan Al-Qur'an, Iqro dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada masyarakat.

Seluruh kegiatan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan diatas merupakan suatu peran-peran yang dijalankan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yang membuktikan bahwa peran kepengurusan perempuan didalam maupun luar partai sangat didukung oleh DPD PDIP Sumatera Selatan secara khusus. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Rian Saputra selaku BSPND (Badan Saksi Pemilu Nasional Daerah Provinsi Sumatera Selatan) DPD PDIP Sumatera Selatan. "*Keterwakilan perempuan dan peran perempuan didalam Partai PDIP sangat diperhatikan secara khusus karena perempuan itu memiliki peran penting dalam politik*"

Analisis peneliti dari hasil wawancara diatas bahwa kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan dalam menjalankan peranannya terutama dalam dunia politik ,mendapatkan perhatian yang lebih dan diberikan dukungan kuat oleh DPD PDIP Sumatera Selatan ,baik dalam politik maupun dalam kegiatan sosial lainnya.

Peran yang dilaksanakan oleh pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan didalam kegiatan partai maupun diluar partai sudah pada ketentuan yang mengikuti peraturan yang ada dalam AD/ART partai PDIP dan sesuai dengan porsi pada bidang masing-masing kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan. Peranan yang dilakukan oleh pengurus perempuan dan laki-laki tidak memiliki perbedaan ,peran diberikan dan harus dilaksanakan oleh pengurus adalah segala hal yang telah ditetapkan berdasarkan AD/ART partai PDIP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keterwakilan perempuan pada partai demokrasi Indonesia perjuangan provinsi Sumatera Selatan .DPD PDIP Sumatera Selatan dalam keterwakilan perempuan pada kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada kepengurusan perempuan pada DPD PDIP Sumatera Selatan. Berikut peran pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan dan proses rekrutmen pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan.

Proses dalam pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan melalui tahap rekrutmen yang memiliki 5 (lima) tahapan sebagai berikut : memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) anggota DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu minimal 2 tahun. Calon pengurus perempuan DPD PDIP telah mengikuti pelatihan kader perempuan yang diadakan oleh DPP PDIP. Memiliki komitmen untuk partai PDIP. Finansial yang baik. Mengisi blanko pribadi oleh calon pengurus perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan .Proses seleksi dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut: 1).pengisian blanko 2).Pengajuan visi misi 3).seleksi 4).penetapan pengurus perempuan 5). Pengesahan kepengurusan partai.Keterwakilan perempuan pada kepengurusan DPD PDIP Sumatera Selatan telah mencapai 30% sesuai dengan ketentuan partai .

Peran kepengurusan perempuan DPD PDIP Sumatera Selatan yaitu, pertama melakukan sosialisasi rutin mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak-anak dan perempuan, kedua ,kegiatan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, ketiga, menjadi pendorong dalam sektor pendidikan anak-anak dan keempat, berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan pada anak-anak dan perempuan di masyarakat.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan 2019 (ADART PDIP PERJUANGAN 2019)
- Anwar,Khoirul, (2013). Respon Partai Politik dalam Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan (Studi Pada Partai PDI-P dan PKS dalam Pileg Tahun 2009 di Kabupaten Ngawi).*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 nomor 1,hal 39-52.
- Amini,Mutiara (2021). *Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Asna,Nur, (2019).*Gender Quota Dan Problem Representasi Perempuan Di Legislatif (Studi atas Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh PDIP Dan PAN di Kabupaten Kudus)*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Budiardjo,Miriam, (2008).*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building.
- Dzikri Mustaqim,Ahmadza, (2018).*Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kuota Tiga Puluhan Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

- Emir, (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakih, Mansour (2018). *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Flick, Uwe, (2013). *The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis*, London: SAGE Publications Ltd.
- Hanum, Farida (2018). *Kajian dan Dinamika Gender*, Malang: Intrans Publishing
- Hidayat, Rachmad, (2020). *Maskulinisme Dalam Konstruksi Ilmu*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Ropik, Ainur, & Wijaya, (2019). *Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan (Studi Kasus Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin)*. Palembang: Rafah Press
- Hardjaloka, Loura, (2012). Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9 nomor 2, hal 404-430.
- Kartika Sari, Shinta, (2022). Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di DPRD DKI Jakarta. *Jurnal Adhikari*, Volume I nomor 3, hal 106-117.
- Kurniawan, Nalom, (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 nomor 4, hal 716-736.
- Mulyono, Ignatius, (2010). Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. Hal 1-6.
- Pratama, Rahmat, (2020). *Partisipasi Elit Politik Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM Kota Palembang Pada Pemilu 2019*. Skripsi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 BAB II.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 19-B/KPTS-DPD/DPP/VI/2021 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2019-2024.
- Thamrin, dkk, (2019). Laporan Keterwakilan Perempuan. hal 1-48.
- Uce, Loeziana, (2020). Keseimbangan Peran Gender Dalam Al Qur'an. *Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh*. hal 35-54.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Rinda Fitriani Khoza, Ainur Ropik, Erik Darmawan, Keterwakilan Perempuan Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, JSIPOL, Vol.3 Issue.4 No.1, Oktober 31, 2024

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Wahyono, Hari, (2005). Makna dan Fungsi Teori dalam Proses Berpikir Ilmiah dan Dalam Proses Penelitian Bahasa. *Jurnal Penelitian Inovasi*, Volume 23 nomor 1, hal 17701.